



LAPORAN KINERJA 2025

TRIWULAN 1

**BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPSDI sebagai unit kerja eselon III.b di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Selama triwulan I tahun 2025, BRPSDI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai target dan capaian kinerja, serta keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai pelaksanaan program kerja BRPSDI selama triwulan I tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi internal sekaligus umpan balik yang berguna dalam perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKj ini. Harapan kami, laporan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan semua kegiatan BRPSDI selama triwulan I Tahun 2025.



Purwakarta, 9 April 2025
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan

Dr. Iswari Ratna Astuti
NIP. 19691124 199503 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
I. PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan	9
1.3 Tugas dan Fungsi.....	9
1.4 Struktur Organisasi	11
1.5 Keragaan Pegawai.....	12
1.6 Sistematis Laporan Kinerja	13
1.7 Potensi dan Permasalahan	14
II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI.....	21
2.3 Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2025.....	22
2.4 Pengukuran Kinerja.....	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2025	24
3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja.....	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	39
IV. PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut	51
4.3 Saran	51
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tangkapan layar capaian indikator Kinerja BRPSDI triwulan I tahun 2025 pada aplikasi KINERJAKU	5
Gambar 2. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020.....	11
Gambar 3. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan PNS dan non PNS Tahun 2025.....	12
Gambar 4. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional Tahun 2025	13
Gambar 5. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada Dashboard Aplikasi Triwulan I Tahun 2025 per tanggal 16 April 2025 Sumber: (http://kinerjaku.kkp.go.id)	24
Gambar 6. Realisasi Pendapatan Per Akun penerimaan per 31 Maret 2025 ...	35

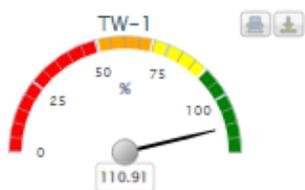
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BRPSDI selama Triwulan I Tahun 2025	6
Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025	12
Tabel 3. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2025	15
Tabel 4. Tabel Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2025	21
Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2025	22
Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian kinerja BRPSDI Tahun 2025	25
Tabel 7. Capaian IKK 1. BRPSDI triwulan I Tahun 2025.	26
Tabel 8. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%) lingkup BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025	27
Tabel 9. Capaian IKK 2. BRPSDI Triwulan I Tahun 2025.	28
Tabel 10. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan I Tahun 2025	29
Tabel 11. Capaian IKK 4. BRPSDI Triwulan I Tahun 2025	30
Tabel 12. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan I Tahun 2025	31
Tabel 13. Capaian IKK 6 BRPSDI triwulan I Tahun 2025	32
Tabel 14. Capaian Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) BPPSDMKP triwulan I tahun 2025	32
Tabel 15. Capaian IKK 7 BRPSDI triwulan I Tahun 2025	33
Tabel 16. Capaian IKK 8 Triwulan I Tahun 2025	34
Tabel 17. Capaian Nilai PNPB lingkup BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025	35
Tabel 18. Capaian IKK 9 BRPSDI triwulan I Tahun 2025	36
Tabel 19. Capaian IKU 10. BRPSDI triwulan I Tahun 2025	37
Tabel 20. Hasil Perhitungan Capaian IKK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI triwulan I Tahun 2025	38
Tabel 22. Capaian IKK 11 BRPSDI triwulan I Tahun 2025	39
Tabel 23. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja triwulan I tahun 2025	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BRPSDI Jatiluhur Triwulan I Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja BRPSDI Jatiluhur Triwulan I Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada awal tahun 2025, BRPSDI Jatiluhur telah merancang dokumen "Perjanjian Kinerja BRPSDI Jatiluhur Tahun 2025" yang terdiri dari satu Sasaran Kegiatan dan sebelas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja BRPSDI Jatiluhur Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dapat diakses melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 1. Tangkapan layar capaian indikator Kinerja BRPSDI triwulan I tahun 2025 pada aplikasi KINERJAKU

Hasil pengukuran Indikator Kinerja BRPSDI pada triwulan I Tahun 2025 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **110,91%**, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKK.

Secara umum, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan termasuk dalam kategori Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari sebelas IKK yang telah disetujui, sebanyak 4 (empat) IKK dapat diukur selama periode triwulan I tahun 2025. Hasil validasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keempat IKK tersebut telah mencapai target periodik yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi. Adapun IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%), memiliki target triwulan I yakni 85, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 85 (100,00%);
2. IKK Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%), memiliki target triwulan I yakni 80, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%);
3. IKK Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target triwulan I yakni Rp. 300.000, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 22.182.249 (120,00%);

4. IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target triwulan I yakni 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (100,00%);

Gambaran lengkap capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BRPSDI selama triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BRPSDI selama Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW I 2025		%
		TARGET	REALISASI	
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85	85	100,00
	2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)			
	3 Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)			
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)			
	5 Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)			
	6 Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80	100	120,00
	7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)			
	8 Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	300.000	22.182.249	120,00
	9 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)			
	10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00
	11 Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)			

Secara Umum, Nilai Kinerja Organisasi BRPSDI pada Trwiulan I Tahun 2025 dapat dikatagorikan **Istimewa** dengan skor **110,91**. Capaian kinerja BRPSDI dari 4 Indikator kinerja yang diukur, sebanyak 2 indikator kinerja berhasil mencapai prosentase capaian melebihi 100% yaitu 120,00%, sedangkan 2 indikator kinerja lainnya berhasil memperoleh nilai capaian 100%. Penjabaran detail mengenai capaian IKU akan dijelaskan secara rinci dalam

sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja. Pada pelaksanaan kegiatan Triwulan I tahun anggaran 2025, BRPSDI berhasil mencapai realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 20.78% dari pagu anggaran efektif total Rp. 6.304.981.000 paska blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 56.996.000 dari pagu semula Rp. 6.361.977.000,-. Dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran, penambahan blokir anggaran senilai Rp. 1.257.582.000,- pada revisi anggaran di triwulan I maka pagu efektif yang dapat digunakan per maret 2025 adalah Rp. Rp. 5.047.399.000. Dengan Demikian realisasi anggaran yang dicapai paska efisiensi anggaran adalah adalah 25,96%.

Capaian kinerja BRPSDI pada Triwulan I tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam memberikan arahan guna meningkatkan kinerja BRPSDI pada masa mendatang. Selama pelaksanaan kegiatan Triwulan I tahun 2025, BRPSDI telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah adanya dinamika kebijakan efisiensi anggaran berpengaruh terhadap perubahan target kinerja dan penyelenggaraan operasional perkantoran.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Eselon III.b di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BRPSDI berada pada lingkup unit organisasi binaan dibawah Sekretariat BPPSDMKP sebagai Unit Organisasi Pembina. BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020 yakni melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Laporan Kinerja BRPSDI Triwulan I Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerjanya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut dilakukan berdasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 10) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja Baru di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 11) Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 12) Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024;
- 13) Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029;
- 14) Perjanjian Kinerja BRPSDI Tahun 2025.

Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI dalam rangka mewujudkan good governance, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di BRPSDI. Oleh karena itu, BRPSDI sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja triwulan I tahun 2025 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudin dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja (LKj) selama triwulan I Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. LKj BRPSDI disampaikan kepada Kepala BPPSDMKP melalui Sekretaris BPPSDMKP.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6 "Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai saat ini KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.

BRPSDI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dalam surat Nomor: B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020. BRPSDI mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.

Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 3 PER.80/MEN/2020 terkait tugasnya Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 2) Pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, mencakup *restocking* sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerja sama riset;
- 4) Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Penyelenggaraan fungsi BRPSDI tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan Tim Kerja selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 meliputi Koordinasi dan pelaksanaan Fungsi Dukungan Manajerial, Keuangan, BMN, Kepegawaian, Perencanaan, Monev, Pelaporan, Pelayanan, Persuratan dan Rumah Tangga.

Keberadaan BRPSDI menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

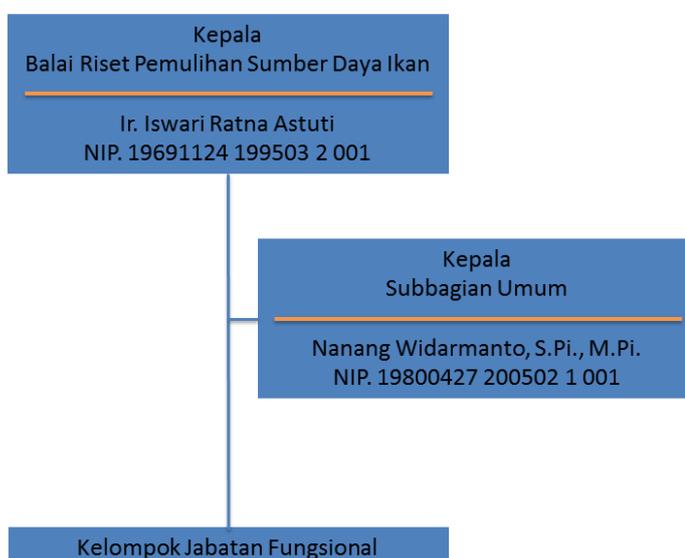
- 1) Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya perikanan,
- 2) Pemulihan sumber daya ikan,
- 3) Monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
- 4) Perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

Dukungan hasil penelitian bagi pengelolaan sumber daya ikan sangat diperlukan agar hasil yang akan dicapai dapat optimal dan berlandaskan kajian ilmiah.

1.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja BRPSDI tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BRPSDI terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang saat ini terdiri atas jabatan fungsional instruktur, perencana, analis pranata keuangan, dan pustakawan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BRPSDI sesuai dengan PER.80/MEN/2020

Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.686/BRSDM-BRPSDI/KP.440/VIII/2024, Kepala BRPSDI dibantu oleh 1 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan jumlah anggota sebanyak 14 orang untuk mewujudkan 11 Indikator Kinerja Kegiatan dengan uraian fungsi sebagai berikut :

- a. Rincian pelaksanaan kegiatan manajerial tersusun rapih
- b. Peran anggota Tim Kerja terbagi sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan
- c. Kegiatan sesuai dengan perencanaan
- d. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja

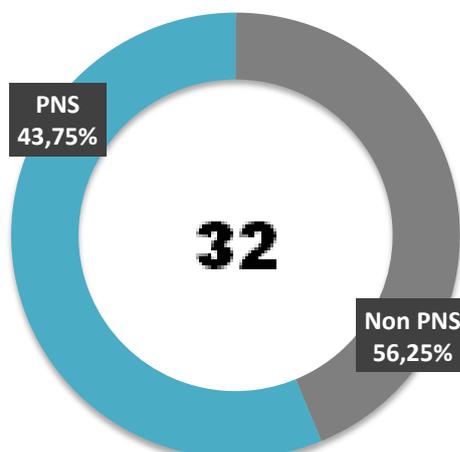
- e. Tersusunnya hasil kinerja anggota timnya kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
- f. Terlaksananya kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antara anggota Tim Kerja

1.5 Keragaan Pegawai

Kondisi sumber daya manusia di BRPSDI Tahun 2025 adalah pegawai BRPSDI berjumlah 34 orang terdiri dari 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 pegawai kontrak dengan rasio 42,42% dan 57,58% (**Gambar 2**). Jumlah SDM yang terdapat di BRPSDI masih relatif ideal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Kondisi sumber daya manusia BRPSDI Tahun 2025 disajikan pada **Tabel 1**.

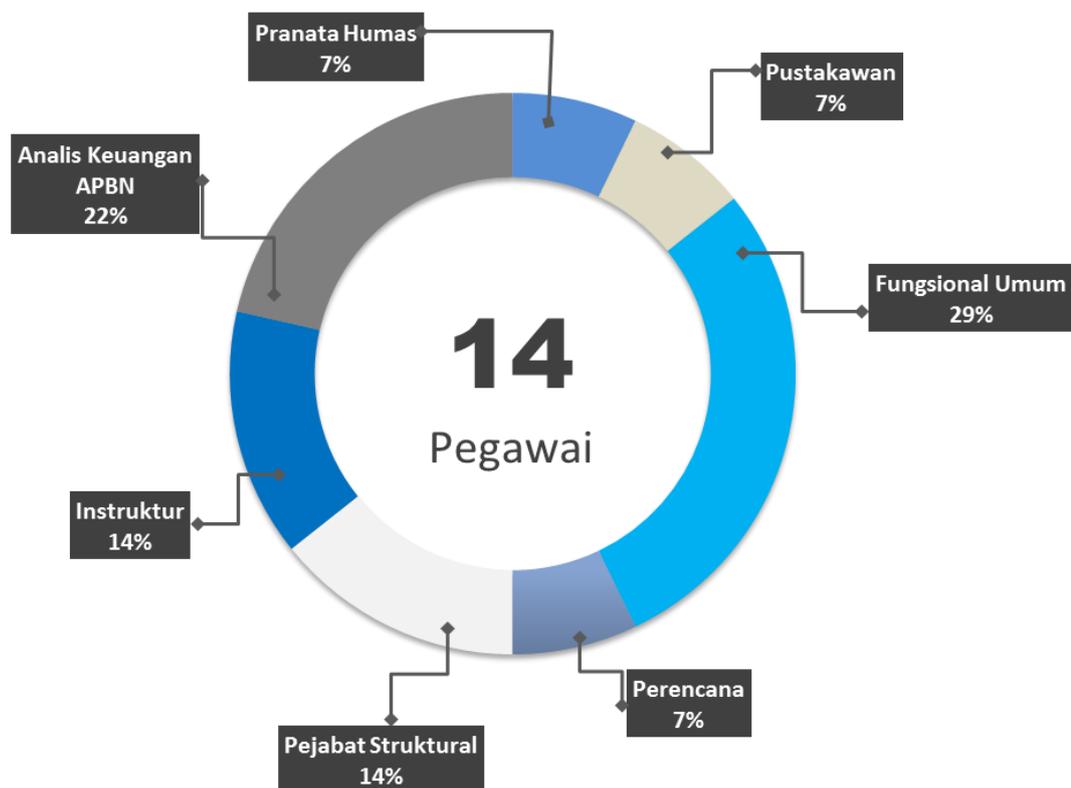
Tabel 2. Keragaan sumber daya manusia di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025

No	Staf BRPSDSI	Pegawai Negeri Sipil	Kontrak	Total
1	Struktural	2	-	2
2	Instruktur	2	-	2
3	Analisis APBN	3	-	3
4	Pranata Humas	1	-	1
5	Perencana	1	-	1
6	Pustakawan	1	-	1
7	Fungsional Umum	4	-	4
8	Pramubakti	-	11	13
9	Pengemudi	-	3	3
10	Satpam	-	4	4
Jumlah		14	18	32



Gambar 3. Distribusi pegawai BRPSDI berdasarkan PNS dan non PNS Tahun 2025.

Peta sebaran fungsional dan non fungsional BRPSDI terdiri dari Instruktur (2 orang), Analis Keuangan APBN (3 orang), fungsional Pustakawan (1 orang), Pranata Humas (1 orang), Perencana (1 Orang) fungsional lainnya (4 orang) dan pejabat struktural (2 orang). Persentase pegawai non fungsional (fungsional lainnya) tersebut merupakan staf pelaksana di BRPSDI dan beberapa fungsional non kelas (**Gambar 3**).



Gambar 4. Komposisi pegawai BRPSDI berdasarkan jabatan fungsional Tahun 2025

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPSDM.

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.7 Potensi dan Permasalahan

1.7.1 Potensi

A. Organisasi

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dengan program riset pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) diharapkan mampu mengatasi masalah dan menjawab kendala mengenai degradasi sumber daya ikan yang ada secara efektif dan efisien, sehingga mampu memprediksi, mencegah, dan mengatasi berbagai permasalahan kerusakan sumber daya ikan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRPSDI didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fisik.

B. Sumber daya

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi yang merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yang dilaksanakan melalui kegiatan riset perikanan.

SDM pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai negeri sipil/PNS dan non ASN /tenaga kontrak. Pada tahun 2025, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan memiliki SDM

BRPSDI mempunyai pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 15 orang yang dibantu oleh pegawai dengan perjanjian kerja kontrak atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) sebanyak 19 orang (**Tabel 2**).

Tabel 3. Keragaan sumber daya manusia BRPSDI 2025

No	Staf BRPSDI	Pegawai Negeri Sipil	Kontrak	Total
1	Struktural	2	-	2
2	Instruktur	2	-	2
3	Analisis APBN	3	-	3
4	Pranata Humas	1	-	1
5	Perencana	1	-	1
6	Pustakawan	1	-	1
7	Fungsional Umum	4	-	4
8	Pramubakti	-	11	13
9	Pengemudi	-	3	3
10	Satpam	-	4	4
Jumlah		14	18	32

b. Sumber daya sarana-prasarana

Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan meliputi aset berwujud. Aset berwujud terkait pelaksanaan fungsi riset maupun pengembangan SDM diantaranya sarana laboratorium yang tersebar di unit kerja untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat tentang obyek riset dan pengembangan KP. Aset Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2025, diantaranya

- Laboratorium Pengujian BRPSDI yang terdiri atas Laboratorium Kimia Air, Laboratorium Biologi Ikan, Laboratorium Plankton dan Larva, Laboratorium Bentuk dan Laboratorium Genetik.
- Gedung Kantor seluas: 1.058 m² dengan No. IMB: 503/IMB.410-DTRB/2004, tgl. 17 September 2004 yang terdapat di sekitar kawasan Waduk Ir. H. Djuanda;
- Luas Tanah 3.988 m² yang berlokasi di kawasan Munjul, Purwakarta yang dipergunakan untuk rumah dinas;
- Beberapa sarana dan prasarana lainnya seperti guest house, perpustakaan, peralatan laboratorium dan survei lapangan serta kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

1.7.2 Permasalahan

Permasalahan utama dalam bidang pemulihan sumber daya ikan adalah kompleksnya penyebab penurunan sumber daya ikan akibat tangkap

lebih dan kerusakan atau penurunan kualitas habitat perairan akibat pencemaran atau dampak aktifitas antropogenik lainnya disamping penyebab alami seperti suksesi ekologi, perubahan iklim dan bencana alam. Pemulihan sumber daya ikan membutuhkan latar belakang data dan informasi serta model restocking dan rehabilitasi/restorasi yang relevan sehingga upaya pemulihan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien serta optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan menjadi penting dalam rangka mendukung salah satu misi KKP yaitu “Keberlanjutan” karena sumber daya ikan yang pulih artinya dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan mengingat sifatnya yang dapat diperbarui.

Upaya pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset di BRPSDI yang teridentifikasi antara lain:

1. Perubahan kelembagaan paska transformasi lembaga riset berdampak penurunan pemanfaatan sarana dan prasarana riset dan perubahan target kinerja pada tahun 2025.
2. Pembatasan jenis layanan publik dan produk layanan publik (KepmenKP Nomor 54 Tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan Jasa analisa laboratorium yang selama ini menjadi sumber PNBK BRPSDI.
3. Terbatasnya informasi dan anggaran dalam pelibatan dan keikutsertaan pegawai pada pelatihan dan seminar menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber utama pangan, penyedia lapangan kerja dan pemberi manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga perikanan mempunyai arti penting sosial dan ekonomi yang sangat besar. Sampai saat ini, sebagian besar kebutuhan produk perikanan Indonesia masih dipenuhi dari kegiatan perikanan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan perikanan yang dinamis dan meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan telah meningkatkan eksploitasi sumber daya secara intensif. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari stok ikan dieksploitasi secara penuh, bahkan diusahakan secara berlebihan. Selain itu, masalah degradasi lingkungan semakin meningkatkan laju penurunan sumber daya hayati perikanan di kawasan perairan umum daratan dan pesisir laut. Dampak dari kondisi tersebut sumber daya ikan mengalami penurunan baik stok ikan maupun kualitas habitatnya sehingga memerlukan pemulihan.

Penyediaan data dan informasi serta teknologi mengenai pemulihan sumber daya ikan akan terpenuhi dan lebih terkoordinir jika ditangani oleh suatu lembaga riset yang mempunyai mandat untuk melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan institusi riset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dan mempunyai mandat melaksanakan riset di bidang pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut di tingkat nasional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga semua peneliti yang sebelumnya bekerja di BPPSDM akan diintegrasikan ke dalam BRIN. Hal ini mengakibatkan transformasi kelembagaan, tugas, dan fungsi BPPSDM. Seluruh peneliti di BPPSDM harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan memindahkan diri ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berdampak pada transformasi kelembagaan Pusat dan UPT yang terkait dengan BPPSDM. Penyesuaian ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Meskipun demikian, hingga Triwulan IV, KKP masih

dalam proses menyusun Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tersebut. Sehingga, susunan organisasi dan tata kerja BPPSDM untuk level Unit Pelaksana Teknis masih mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020.

2.1.1. Visi

Visi KKP 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi BRPSDI adalah mendukung Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 yang juga mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2. Misi

Misi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan serta mengacu pada BPPSDMKP yang melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentrasentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

2.1.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dukungan pada pencapaian tujuan BPPSDMKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing; dan
2. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan BPPSDM guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai tugas dan fungsi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, secara umum fungsi BRPSDI meliputi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- 2) Pelaksanaan penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi penelitian pemulihan sumber daya ikan, mencakup restocking sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- 3) Pelayanan teknis, jasa informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama penelitian pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut;
- 4) Pengelolaan sarana dan sarana penelitian, dan;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kegiatan riset pemulihan sumber daya ikan direncanakan dan diarahkan untuk menghasilkan informasi dan teknologi yang mendukung pembangunan sektor perikanan khususnya subsektor perikanan tangkap yang tangguh baik di perairan tawar maupun laut. Berdasarkan mandat dan tupoksi, tujuan dan sasaran BRPSDI ditetapkan berdasarkan output kegiatan yang tertuang dalam kertas kerja RKA-K/L.

2.1.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 "Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten". Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

SP-2 Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat

SP-3 Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

SP-4 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 mengacu pada sasaran strategis KKP dan BPPSDMKP yang pada unit eselon III disebut sebagai Sasaran Kegiatan (SK) BRPSDI adalah:

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Perubahan Sasaran Kegiatan (SK) dari "*Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker*" pada tahun 2025 menjadi "*Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan*" pada tahun 2025, diikuti dengan beberapa perubahan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan sebagai pada tahun 2025. Adapun IKK yang dicascadingkan dari Sekretariat BPPSDMKP kepada BRPSDI Jatiluhur, antara lain:

1. Penambahan IKK baru yakni "*Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)*"; "*Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)*"; dan "*Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)*".
2. Penghapusan IKK "*Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPSDI (%)*"; "*Persentase Unit Kerja BRPSDI yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)*"; dan "*Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPSDI (Nilai)*".

Sasaran Kegiatan (SK-1) yang akan dicapai adalah "*Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan*". Indikator Kinerja yang mendukung SK ini antara lain:

1. IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%), memiliki target Tahunan 85;
2. IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI(Nilai), memiliki target Tahunan 92;
3. IKK Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai), memiliki target Tahunan 80,00;

4. IKK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai), memiliki target Tahunan 71,5;
5. IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks), memiliki target Tahunan 82,5;
6. IKK Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%), memiliki target Tahunan 80;
7. IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%), memiliki target Tahunan 80;
8. IKK Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target Tahunan 2.200.000;
9. IKK Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan), memiliki target Tahunan 1;
10. IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target Tahunan 100;
11. IKK Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai), memiliki target Tahunan 90;

2.2 Rencana Kinerja Tahunan BRPSDI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Kegiatan, BRPSDI, maka Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4. Tabel Rencana Kerja BRPSDI Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU DIPA AWAL (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF DIPA AWAL (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI I (Rp. 000)	PAGU EFEKTIF REVISI II (Rp. 000)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	6.361.977	6.304.981	5.047.399	5.420.575
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025		6.361.977	6.304.981	5.047.399	5.420.575
Tanggal Pengesahan		2 Desember 2024	2 Desember 2024	21 Februari 2025	9 April 2025

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2025 (DS: 6720-3055-4685-5943) yang setelah disahkan pada tanggal 02 Desember 2024 adalah sebesar Rp

6.361.977.000,-. Sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025, BRPSDI telah melakukan 2 (dua) kali revisi DIPA. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia dan relaksasi pembukaan blokir efisiensi.

2.3 Perjanjian Kinerja BRPSDI TA 2025

Dalam mencapai sasaran, BRPSDI telah disusun suatu Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja tahunan terdiri atas indikator kinerja kegiatan dan rencana tingkat capaian (target), serta uraian output kegiatan. Perjanjian Kinerja Tahunan BRPSDI didasarkan pada perjanjian kinerja BPPSDMKP secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) BRPSDI Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI(Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5
		6	Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	80
		8	Nilai PNPB Satker BRPSDI (Rupiah)	2.200.00
		9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1
		10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100
		11	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90

2.4 Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRPSDI Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BRPSDI dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada penyusunan Laporan Kinerja BRPSDI yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BRPSDI Nomor: B.16/BRPSDI/KP.440/I/2025 tentang pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dan TIM Penyusun Laporan kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tahun 2025.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari Kepala Balai selaku Penanggung Jawab, Sub Koordinator Tata Operasional sebagai Ketua, Sekretaris, Anggota dan Kontributor. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau langsung oleh Kepala Balai selaku Penanggung Jawab dan Sub Koordinator Tata Operasional sebagai penanggungjawab Tim Pengelolaan Kinerja, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Sekretaris BPPSDMKP.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja Organisasi BRPSDI Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan kegiatan pada peta strategi yang dituangkan pada Perjanjian kinerja BRPSDI tahun 2025 dapat tercapai.

Evaluasi dan analisis kinerja yang dibahas dalam LKj BRPSDI Triwulan I Tahun 2025 dilakukan berdasarkan dokumen PK BRPSDI Tahun 2025. Pencapaian kinerja berdasarkan dokumen PK BRPSDI telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NKO. Nilai NKO ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).

Nilai Kinerja Organisasi BRPSDI pada Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan dokumen PK Tahun 2025 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai **110,91%**, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing IKU



Gambar 5. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi pada Dashboard Aplikasi Triwulan I Tahun 2025 per tanggal 16 April 2025 Sumber: (<http://kinerjaku.kkp.go.id>).

Secara umum, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan termasuk dalam kategori Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari sebelas indikator yang ditetapkan hasil verifikasi dan validasi yang telah

dilakukan menunjukkan bahwa seluruh IKK tersebut telah mencapai target periodik sesuai dengan rencana aksi.

Tabel 6. Hasil Pengukuran Capaian kinerja BRPSDI Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW I 2025		%
		TARGET	REALISASI	
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85	85	100,00
	2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)			
	3 Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)			
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)			
	5 Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)			
	6 Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80	100	120,00
	7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)			
	8 Nilai PNBPN Satker BRPSDI (Rupiah)	300.000	22.182.249	120,00
	9 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)			
	10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00
	11 Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)			

Secara Umum, NKO BRPSDI Triwulan I Tahun 2025 yang telah diukur dapat dikategorikan Istimewa. Nilai yang ditargetkan sudah terpenuhi, bahkan sebagian besar melebihi target. Penjabaran detail mengenai capaian IKK akan dijelaskan secara rinci dalam sub bahasan Evaluasi dan Analisis Kinerja.

3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPSDI. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRPSDI yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

SK 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP

Pada sasaran kegiatan ini BRPSDI berperan serta dalam mendukung Sasaran Strategis KKP yaitu “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten” melalui Sasaran Program “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP”. Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersebut dilakukan dengan menghasilkan 11 Indikator Kinerja. Adapun penjabaran IKK tersebut antara lain:

IKK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Tahun 2024 s.d. Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BPPSDMKP. IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPSDI yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dikategorikan sebagai IKK yang memiliki tingkat validitas output kendali tinggi. Periode sasi pengukuran IKK ini dilakukan setiap triwulan.

Tabel 7. Capaian IKK 1. BRPSDI triwulan I Tahun 2025.

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	75	82 (100%)	85	85	100%	-	85	100%

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2025 diambil dari Surat Dinas Sekretariat BPPSDMKP perihal Capaian IKU “Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP”” No. B. 3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025. Adapun nilai capaian IKK ini ialah sebagai berikut:

Nilai capaian IKK1 triwulan I tahun 2025 ialah 85. Nilai tersebut merupakan representasi atas seluruh rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Tahun 2024 s.d. Tahun 2025 telah ditindaklanjuti oleh tim secara tuntas. Capaian tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah tetap 100% hal ini dikarenakan BRPSDI tidak termasuk satker yang melaksanakan uji petik pengawasan Itjen.

Faktor Keberhasilan dalam mencapai indikator ini didukung oleh komitmen BRPSDI dalam menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan anggaran berdasarkan prinsip kepatuhan, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalisme, dan kewajaran. Selain itu, tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten turut menjadi faktor pendukung. Pencapaian IKK 7 juga dipengaruhi oleh **kegiatan pendukung**, khususnya pemantauan dari Kepala BRPSDI yang senantiasa menekankan pentingnya penyelesaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, tertib secara administratif, serta sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 8. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%) lingkup BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BPPSDM KP	32	31	96,88
2	Pusdik KP	0	0	0
3	PuslatKP	0	0	0
4	Pusluh KP	4	4	100
6	BBRP2BKP	0	0	0
7	BBRSEKP	0	0	0

No	Satker	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	BPPP Tegal	8	8	100
2	SUPM Tegal	46	37	80,43
3	POLTEK AUP Jakarta	30	26	86,67
4	POLTEK Bone	22	21	95,45
5	POLTEK Karawang	3	3	100
6	POLTEK Pangandaran	12	11	91,67
7	BRPPUPP Palembang	11	11	100
8	BRPBATP Bogor	3	3	100

IKK 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

IKK ini ditetapkan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BRPSDI yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKK ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen).

Tabel 9. Capaian IKK 2. BRPSDI Triwulan I Tahun 2025.

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	92	-	-	-	92	-

IKK Nilai IKPA BRPSDI belum dapat diukur pada periode triwulan I, dikarenakan IKK ini bersifat Semesteran. Penilaian IKK ini menggunakan instrumen dari Kementerian Keuangan, yaitu aplikasi OMSPAN (Online Monitoring – Sistem Perbendaharaan dan Administrasi Negara) pada website (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>). Hasil penilaian IKK tersebut disampaikan oleh Biro Keuangan melalui Nota Dinas Sekjen KKP.

IKK 3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah

dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP BRPSDI dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Tabel 10. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	-	-	-	80	-

Dokumen bukti dukung penilaian mandiri SAKIP adalah Surat hasil verifikasi penilaian mandiri SAKIP dari Sekretariat BPPSDM KP yang akan diukur pada periode tahunan, oleh karena itu IKK ini belum dapat diukur di periode triwulan I.

IKK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)

IKK ini didefinisikan sebagai nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. KMK Nomor 466 Tahun 2023

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 11. Capaian IKK 4. BRPSDI Triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)*									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	71,5	-	-	-	71,5	-

*Tahun 2021-2023 nama IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Tahun 2024 berubah formulasi menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

IKK ini tergolong sebagai indikator dengan tingkat validitas output kendali rendah, yakni indikator yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator. Dengan kata lain, capaian indikator ini dipengaruhi oleh pihak-pihak/stakeholder lain, baik secara langsung (kebijakan, kontribusi, keterlibatan) maupun tidak langsung (instrumen). IKK ini diukur pada periode penilaian tahunan sehingga belum dapat diukur pada triwulan I.

IKK 5. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai capaian indeks profesionalitas ASN diperoleh dari jumlah nilai kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN. Nilai kesesuaian kualifikasi pendidikan dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar pada pegawai. Nilai kompetensi dapat ditingkatkan dengan mengirimkan pegawai pada diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat teknis

dan fungsional untuk fungsional umum dan pejabat fungsional, serta seminar untuk pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan nilai kedisiplinan ditentukan berdasar ada tidaknya hukuman disiplin yang dikenakan pada pegawai.

Tabel 12. Capaian IKK 3 BRPSDI Triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-1. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	82,5	-	-	-	-	82,5	-

Pengukuran IKK Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi ropeg KKP (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>) dan diukur dalam periode semesteran. Dengan demikian, capaian IP-ASN belum dapat diukur pada periode triwulan I.

IKK 6. Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)

IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPSDI didefinisikan sebagai Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Dasar Hukum: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengisian data dilaksanakan pada setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya.

Tabel 13. Capaian IKK 6 BRPSDI triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-6. Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	100	120%	-	80	120%

Pengukuran IKK 6 Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) diperoleh Nilai Capaian indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 100 atau 120% sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang “Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025”.

Pada triwulan I tahun 2025 ini, BRPSDI berhasil mencapai target yang ditentukan. Namun demikian, nilai ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan IKK ini adalah IKK baru yang dicascadingkan tahun 2025.

Tabel 14. Capaian Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%) BPPSDMKP triwulan I tahun 2025

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,852,355,000	3,602,011,000	3,250,344,000	0	3,250,344,000	100.00%
2	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,734,269,000	766,079,000	968,190,000	0	968,190,000	100.00%
3	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,380,044,000	510,142,000	869,902,000	0	869,902,000	100.00%
4	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,713,372,000	945,404,000	1,767,968,000	0	1,767,968,000	100.00%
5	BALAI RISET PERIKANAN IKAN	5,190,690,000	2,071,320,000	3,117,369,000	0	3,117,369,000	100.00%
6	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,884,926,000	2,455,714,000	4,429,212,000	0	4,429,212,000	100.00%
7	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	5,027,470,000	2,990,213,000	2,037,257,000	0	2,037,257,000	100.00%
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	3,699,357,000	1,360,567,000	2,338,790,000	0	2,338,790,000	100.00%
9	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	8,172,722,000	2,874,033,000	5,298,689,000	0	5,298,689,000	100.00%
10	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	12,977,451,000	7,284,745,000	5,692,706,000	0	5,692,706,000	100.00%
11	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	3,090,000,000	1,666,257,000	1,423,743,000	0	1,423,743,000	100.00%
12	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,871,421,000	3,366,137,000	2,505,284,000	0	2,505,284,000	100.00%
13	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	10,351,733,000	8,974,145,000	1,377,588,000	0	1,377,588,000	100.00%
14	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15,645,586,000	7,988,044,000	7,677,542,000	0	7,677,542,000	100.00%
15	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	5,353,114,000	3,899,339,000	1,453,775,000	0	1,453,775,000	100.00%
16	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	12,180,968,000	10,520,456,000	1,660,502,000	0	1,660,502,000	100.00%
17	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	11,198,948,000	9,407,506,000	1,791,442,000	0	1,791,442,000	100.00%
18	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	4,894,433,000	3,558,327,000	1,336,106,000	0	1,336,106,000	100.00%

Dalam perolehan capaiannya dapat diidentifikasi beberapa faktor keberhasilan capaian IKK 6 adalah satker BRPSDI telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan

pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Selain itu, terdapat **faktor pendukung** yang berkontribusi terhadap capaian IKK 6 yakni tindak lanjut atas perbaikan *tagging* pada aplikasi SIRUP, dengan memisahkan *tagging* belanja pengadaan dan belanja non pengadaan. Hasil *tagging* belanja non pengadaan tidak membentuk Pagu Pengadaan, sehingga tidak dilanjutkan dengan proses sampai dengan RUP Terumumkan.

IKK 7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN BRPSDI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar Hukum: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1)

IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%) terbagi menjadi 5 (lima) unsur, yakni:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025;
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu

Tabel 15. Capaian IKK 7 BRPSDI triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80	-	-	-	80	-

IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI merupakan IKK yang bersifat Tahunan sehingga belum dapat diukur pada periode triwulan I. Bukti dukung capaian IKK ini adalah Surat/Nota Dinas pengukuran tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Sekretaris BPPSDM KP.

IKK 8. Nilai PNBPN Satker BRPSDI (Rupiah)

IKK Nilai PNBPN didefinisikan sebagai manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Adapun Objek/Ruang Lingkup PNBPN diantaranya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKK ini merupakan IKK baru yang dicascadingkan sampai level UPT. Besaran target yang ditetapkan yakni 2.200.000 Rupiah. IKK nilai PNBPN termasuk dalam IKK yang memiliki komposisi validitas Output Kendali Rendah, sedangkan untuk periodisasi waktu pengukuran dari IKK ini ialah triwulanan. Data dukung/bukti capaian yang disepakati ialah data realisasi PNBPN yang diperoleh melalui aplikasi OMSPAN dan Surat Penyampaian Capaian IKK PNBPN dari Kepala BRPSDI kepada Sekretaris BPPSDM KP. Berikut merupakan capaian IKK nilai PNBPN BRPSDI sampai dengan triwulan I Tahun 2025:

Tabel 16. Capaian IKK 8 Triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDM KP									
IKK-8. Nilai PNBPN Satker BRPSDI (Rupiah)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	2.985.120	4.813.840 (962%)	300.000	22.182.249	1008.28%	46,28%	2.200.000	203%

Berdasarkan data pada tabel diatas, target nilai PNBPN pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 300.000,- dan berhasil dicapai dengan nilai capaian IKK Nilai PNBPN BRPSDI periode triwulan I Tahun 2025 yakni sebesar Rp.

22.182.249,- yang diperoleh s.d 31 Maret 2025. Berikut merupakan rincian capaian PNPB BRPSDI per 31 Maret 2025:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun/ Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	4.466.000	0	0	0	0	4.466.000
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	387.272	0	387.272
3	411618 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	17.328.977	0	0	0	0	0	17.328.977
GRAND TOTAL		17.328.977	4.466.000	0	0	387.272	0	22.182.249

Gambar 6. Realisasi Pendapatan Per Akun penerimaan per 31 Maret 2025 (sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>)

Nilai capaian tersebut meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan PNPB pada periode Tahun sebelumnya (2024) yakni Rp. 4.813.840,- atau terjadi peningkatan sebesar 46,28%. Dari target yang telah ditetapkan di triwulan I 2025, Capaian nilai PNPB di triwulan I 2025 ini cukup tinggi dengan mencapai 1008.28% dari target yang ditetapkan. Capaian ini juga lebih tinggi dari capaian PNPB periode triwulan I tahun 2023 dengan nilai Rp. 2.985.120,-.

Tabel 17. Capaian Nilai PNPB lingkup BPPSDMKP Triwulan I Tahun 2025

NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN PNPB (RP)		
		PAGU	REALISASI	Persentase
BPPSDM		32.403.240.000	12.923.578.551	39.88%
SATUAN KERJA PNPB		14.250.179.000	4.339.682.688	30.45%
1	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	284.242.000	696.206.995	244.93%
2	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	474.390.000	109.331.532	23.05%
3	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	450.001.000	27.136.324	6.03%
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	818.828.000	429.694.495	52.48%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	783.175.000	111.975.715	14.30%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	188.600.000	65.107.333	34.52%
7	AK KP WAKATOBI	17.177.000	-	0.00%
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	49.426.000	257.532	0.52%
9	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	-	4.550.212	0.00%
10	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.025.000	52.894.242	96.13%
11	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	-	32.060.562	0.00%
12	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UJUMBU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	41.274.000	26.807.569	64.95%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2.200.000	22.182.249	1008,28%
14	LOKA RISET PERIKANAN TONJA	-	2.323.023	0.00%
15	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	552.000.000	45.098.051	8.17%
16	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	1.623.862.000	203.894.218	12.56%
17	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	92.800.000	17.920.456	19.31%
18	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	210.000.000	28.931.600	13.78%
19	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN	408.640.000	131.822.730	32.26%
20	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	26.500.000	1.327.244	5.01%
21	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	-	2.726.045	0.00%
22	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	-	2.155.224	0.00%
23	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	543.951	0.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	239.929.000	44.966.210	18.74%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	165.334.000	4.880.605	2.95%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	385.000.000	371.159.236	96.40%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	104.000.000	44.519.450	42.81%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	366.025.000	10.276.957	2.81%
29	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	2.741.692.000	561.797.997	20.49%
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	105.464.000	6.564.858	6.22%
31	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	1.315.229.000	471.918.366	35.88%
32	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	-	4.524.588	0.00%
33	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	475.000.000	57.952.626	12.20%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	-	69.413.035	0.00%
35	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	454.385.000	442.879.814	97.47%
36	SEKRETARIAT BPPSDM	-	157.437.452	0.00%
37	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	255.074.000	43.914.630	17.22%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	700.907.000	13.082.339	1.87%
39	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	864.000.000	20.247.107	2.34%
SATUAN KERJA BLU		18.153.061.000	8.583.895.863	47.29%
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	7.812.371.000	6.770.691.019	86.67%
41	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	10.340.690.000	1.813.204.844	17.53%

Capaian nilai PNBPN BRPSDI pada triwulan I tahun 2025 jika dibandingkan dengan satker lain yang setara pada lingkup BPPSDMKP termasuk pada satker yang berhasil memperoleh nilai capaian PNBPN melebihi target yang ditentukan dengan capaian prosentase riil adalah 1008.28%.

Faktor keberhasilan dalam peningkatan capaian PNBPN selama tahun 2025 diantaranya adalah adanya keberlanjutan dalam permintaan jasa sewa alat survey BRPSDI dari beberapa lembaga yang secara rutin menggunakan jasa layanan sewa peralatan survey diantaranya dari Perum Jasa Tirta 2. **Kegiatan pendukung** lain yang menunjang capaian PNBPN yaitu kegiatan kegiatan magang mahasiswa/ taruna dan kegiatan kehumasan serta pelayanan publik untuk meningkatkan promosi dan kepuasan penggunaan jasa layanan BRPSDI untuk peningkatan PNBPN.

Capaian PNBPN BRPSDI telah diumumkan dalam surat dinas dari Sekretariat BPPSDMKP B.3216/BPPSDM.1/KU.340/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Capaian Kinerja PNBPN Triwulan I Tahun 2025.

IKK 9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)

IKK ini didefinisikan sebagai Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara BRPSDI dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN BRPSDI mengacu pada PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada KKP, PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN, dan Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian.

Tabel 18. Capaian IKK 9 BRPSDI triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-9. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Cara pengukuran capaian IKK ini dapat dinilai berdasarkan Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. IKK ini memiliki

periodisasi waktu pengukuran Tahunan, namun dapat tercapai sebelum Tahun anggaran berakhir. Akan tetapi pada periode tahun ini, BRPSDI belum menjalin kemitraan baru dengan pihak eksternal KKP. Nilai capaian IKK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPSDI (Kemitraan) tersaji pada tabel berikut.

Capaian kegiatan Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan) merupakan salah satu IKK yang diukur dalam periode tahunan sehingga belum dapat diukur pada periode triwulan I.

IKK 10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)

IKK ini didefinisikan sebagai 'Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPSDI berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

Tabel 19. Capaian IKU 10. BRPSDI triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-10. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
100	100	100	100	100	100	100%	0%	100	100%

IKK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) bersifat Triwulanan, dengan tingkat validasi IKU output kendali tinggi. Bukti dukung capaian IKK ini adalah Dokumen layanan dukungan manajemen internal satker yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang

mendapatkan pengesahan dari Koordinator/Sub Koordinator dan ditandatangani pimpinan satker.

Berdasarkan Tabel tersebut, IKK Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPSDI (%) Tahun 2025 sebesar 100%. Nilai capaian tersebut sama dengan tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 dimana BRPSDI juga mencapai nilai 100. Nilai Capaian tersebut merupakan representasi dari kegiatan yang sudah terlaksana dan telah menghasilkan output berupa laporan kegiatan.

Faktor pendukung tercapainya IKK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI ini diantaranya adalah pelaksanaan dialog kinerja antara pimpinan dengan pegawai untuk pemetaan dokumen output yang disusun serta memastikan ketersediaan dokumen pelaporan yang didukung oleh ketersediaan peralatan perkantoran yang dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan. Selain itu, **kegiatan pendukung** keberhasilan dalam memperoleh capaian IKK 10 pada triwulan I tahun 2025 diantaranya adanya kegiatan-kegiatan rapat dan pertemuan dalam rangka persiapan, pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan,. Kegiatan pengkinian data pelaporan melalui aplikasi pelaporan eSR Menpan dan Dashboard BPPSDM juga berperan dalam mendorong ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian pelaporan.

Tabel 20. Hasil Perhitungan Capaian IKK Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI triwulan I Tahun 2025

NO	LAPORAN	B01		B02		B03		S.D TW I		PRESENTASE
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Laporan Mingguan	4	4	4	4	4	4	12	12	100%
2	Laporan Bulanan	2	2	2	2	2	2	6	6	100%
a	Laporan Bulanan (Manajerial)	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
b	Laporan Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1	3	3	100%
3	Laporan Triwulanan	0	0	0	0	2	2	2	2	100%
a	Laporan Kinerja Triwulan	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
b	Laporan SPIP Triwulan	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
c	Laporan Kegiatan JF	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
TOTAL LAPORAN LAYANAN DUKMAN										100%

IKK 11. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)

Keterbukaan informasi publik didefinisikan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik instansi pemerintah adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Capaian IKK ini diukur melalui beberapa parameter penilaian diantaranya adalah aspek sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, inovasi dan strategi. Metode penilaian dengan menggunakan skala pembobotan untuk menentukan atau menetapkan kategori yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Hasil pengukuran capaian kegiatan Keterbukaan Informasi Publik ini terbagi dalam lima katagori nilai yaitu informatif (90-100), Menuju informatif (80-89,9), Cukup Informatif dengan (60-79,9), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (≤ 39).

Tabel 21. Capaian IKK 11 BRPSDI triwulan I Tahun 2025

2025									
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP									
IKK-11. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)									
Realisasi TW I 2021-2024				2025				Renstra BRPSDI 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target TWI 2025	Realisasi TWI 2025	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	95	-	-	-	95	-

Capaian kegiatan Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI merupakan salah satu IKK yang diukur dalam periode tahunan sehingga belum dapat diukur pada periode triwulan I.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2025 (DS: 6720-3055-4685-5943) yang setelah disahkan pada tanggal 02 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.361.977.000,-. Sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025, BRPSDI telah melakukan 2 (dua) kali revisi DIPA. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia dan relaksasi pembukaan blokir efisiensi. Berikut merupakan kronologis revisi DIPA yang telah dilakukan BRPSDI selama Tahun 2025, yaitu:

1. Revisi I DIPA, berkaitan dengan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.148/MEN-SJ/RC.420/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Usulan Efisiensi Anggaran Belanja KKP TA 2025, serta surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor B.432/BPPSDM/RC.420/II/2025 tanggal 14 Februari 2025. Revisi anggaran tidak mengakibatkan perubahan total pagu DIPA Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan TA 2025, yaitu sebesar Rp 6.361.977.000,-, namun mengakibatkan perubahan pada catatan halaman IV.A DIPA untuk blokir dari semula Rp 56.996.000,- menjadi Rp 1.314.578.000, (bertambah Rp 1.257.582.000,-). Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi I Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2025 (DS: 2530-7409-0340-2294) Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan pada tanggal 21 Februari 2025 dengan jumlah anggaran BRPSDI adalah Rp 6.361.977.000,-. Pagu anggaran BRPSDI yang dapat digunakan pasca revisi anggaran untuk efisiensi adalah sebesar Rp 5.047.399.000,-.

2. Revisi II DIPA, berdasarkan surat Sekretariat Jenderal KKP No B.241/MEN-SJ/RC.420/III/2025 mengenai usulan relaksasi anggaran sebesar Rp 2.120.355.524.000 pada tanggal 21 Maret 2025, maka BPPSDM KKP telah mengusulkan relaksasi buka blokir sebesar Rp 289.725.962.000 atau 100% dari jumlah blokir efisiensi tahun 2025 melalui Surat Sekretaris BPPSDM KP No. 921/BPPSDM.1/RC.410/III/2025 tanggal 21 Maret 2025. Kemenkeu menyetujui untuk membuka/relaksasi blokir anggaran yang berkenaan dengan:

- Honor PPNPN: s.d September + THR
- Honor PJLP: 12 bulan + THR
- Honor PPB: dioptimalkan s.d September + THR. Alternatif lain dengan membuka blokir dan menggeser anggaran dari RO lain yang akan dibahas lebih lanjut
- Honor pengelola keuangan: 1 tahun (jika ada yang diblokir)

- Langganan daya dan jasa (002/52211x): dibuka 1 tahun
- Hal yang berkenaan dengan belanja pegawai 01 (kekurangan gaji existing dan antisipasi penambahan CPNS dan P3K) akan dibahas antara KKP dengan Kemenkeu setelah SK pengangkatan terbit
- BRPSDI membuka /relaksasi blokir anggaran pada Belanja Langganan Listrik (522111), Belanja Langganan Listrik (522113), dan Belanja Keperluan Perkantoran (521111) untuk Honor PPNPN + pembayaran iuran premi BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan September (9+1 bulan), dan gaji Tenaga Jasa Lainnya Perorangan-PJLP dibuka seluruhnya.

Revisi anggaran tidak mengakibatkan perubahan total pagu DIPA Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan TA 2025, yaitu sebesar Rp 6.361.977.000,-, namun mengakibatkan perubahan pada catatan halaman IV.A DIPA untuk blokir dari semula Rp 1.314.578.000,- menjadi Rp 941.402.000, (berkurang Rp 373.176.000,-). Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi II Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-032.12.2.403824/2025 (DS: 8776-4697-4208-0711) Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan pada tanggal 9 April 2025 dengan jumlah anggaran BRPSDI adalah Rp 6.361.977.000,-. Pagu anggaran BRPSDI yang dapat digunakan pasca revisi anggaran untuk efisiensi adalah sebesar Rp 5.420.575.000,-.

Jumlah realisasi keuangan BRPSDI berdasarkan aplikasi OMSPAN/SAKTI per tanggal 31 Maret 2025 ialah **25,96 %** atau **Rp. 1.301.138.989,-** yang terbagi ke dalam dua jenis belanja anggaran, yakni belanja pegawai (51) **Rp. 623.584.469,-** atau **21.23 %** dan belanja barang (52) **Rp. 686.554.520,-** atau **32.53 %**.

Tabel 22. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja triwulan I tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	% Thd Pagu Awal	% Thd Pagu Efektif
1.	Belanja Pegawai	2.936.977.000	-	2.936.977.000	623.584.469	21,23%	21,23%
2.	Belanja Barang	3.368.004.000	1.257.582.000	2.110.422.000	686.554.520	20,38%	32,53%
3.	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total Anggaran :		6.304.981.000	6.304.981.000	5.047.399.000	1.310.138.989	20,78%	25,96%

Tabel 30. Realisasi Anggaran BRPSDI per IKK Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Presentase (%)	RO Pendukung	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)	85	85	100,00%	Layanan Manajemen Keuangan: Pelayanan Keuangan Riset Perikanan	4.983.879.000	1.262.775.501	25,34%
	2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI(Nilai)				Layanan Perkantoran: Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor			
	3 Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)				Layanan Pemantauan dan Evaluasi: Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan	3.760.000	2.000.000	53,19%
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)				Layanan Perencanaan dan Penganggaran: Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Riset Perikanan	3.230.000	2.000.000	61,92%

	5	Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)				Layanan Maanajemen SDM: Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Perikanan	2.930.000	2.000.000	68,26%
	6	Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80	100	120,00%	Layanan Umum: Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Riset Perikanan	41.020.000	32.564.494	79,39%
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)				Layanan BMN: Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Riset Perikanan	2.930.000	2.000.000	68,26%
	8	Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)	300.000	22.182.249	120,00%	Layanan data dan Informasi: Pelayanan Data dan Informasi Riset Perikanan	2.930.000	2.000.000	68,26%
	9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)				Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi: Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Riset Perikanan	6.720.000	4.798.994	71,41%
	10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100	100	100,00%				

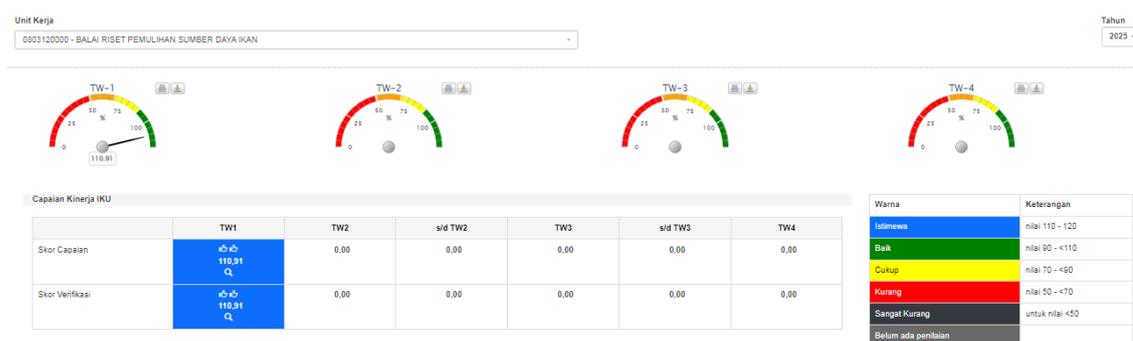


	11	Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)							
TOTAL					110,91		5.047.399.000	1.310.138.989	25,96%

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tugas dan fungsi BRPSDI dalam mendukung BPPSDMKP dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Beberapa Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan aplikasi eksternal (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja) atau Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>). Berdasarkan hasil pengukuran Kinerjaku, capaian kinerja BRPSDI menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar **110,91%** dengan status Istimewa (warna biru). Capaian NKO triwulan I tahun 2025 ini mengalami peningkatan dibandingkan NKO triwulan I tahun 2025 dimana nilai NKO tahun 2025 adalah 108,08%. Pada pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2025, BRPSDI berhasil mencapai realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM SPAN sebesar 20.78% dari pagu anggaran efektif total Rp. 6.304.981.000 paska blokir anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 56.996.000 dari pagu semula Rp. 6.361.977.000,-. Dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran, penambahan blokir anggaran senilai Rp. 1.257.582.000,- pada revisi anggaran di triwulan I maka pagu efektif yang dapat digunakan per maret 2025 adalah Rp. Rp. 5.047.399.000. Dengan Demikian realisasi anggaran yang dicapai paska efisiensi anggaran adalah 25,96%.



Secara umum Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 11 IKK yang disepakati, IK yang dapat diukur pada periodetriwulan I tahun 2025 yakni 4 (empat) IKK. Hasil validasi yang telah dilakukan, keempat IKK tersebut telah memenuhi target periodik yang telah disepakati dalam dokumen Rencana Aksi. Data dukung capaian BRPSDI yang memuat capaian 4 IKK telah diunggah

melalui tautan : https://bit.ly/BRPSDI_CapaianTWI. Adapun IKK tersebut, antara lain:

1. IKK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%), memiliki target triwulan I yakni 85, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 85 (100,00%);
2. IKK Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%), memiliki target triwulan I yakni 80, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (120,00%);
3. IKK Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah), memiliki target triwulan I yakni Rp. 300.000, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 22.182.249 (120,00%);
4. IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%), memiliki target triwulan I yakni 100, dan sudah tercapai dengan nilai capaian 100 (100,00%);

4.2 Permasalahan, Rekomendasi dan Tindak lanjut

Pelaksanaan kegiatan BRPSDI dalam memenuhi atau mencapai target tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala maupun masalah baik teknis maupun non teknis. Secara umum kendala-kendala tersebut sudah berhasil diatasi. Berikut merupakan permasalahan yang muncul selama periode triwulan I Tahun 2025:

Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
Adanya dinamika kebijakan efisiensi anggaran berpengaruh terhadap perubahan target kinerja dan penyelenggaraan operasional perkantoran.	Berkoordinasi dengan bagian program Eselon 1	Terbitnya DIPA Revisi I dan Revisi II dan Penetapan Perubahan Target Kinerja	Pelaksanaan efisiensi anggaran dengan terbitnya revisi II menjadi pagu anggaran efektif yang digunakan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

4.3 Saran

BRPSDI pada periode triwulan I tahun 2025 berhasil memperoleh capaian kinerja pada katagori Istimewa, hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun demikian, dalam rangka melakukan perbaikan kedepan beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain adalah melakukan verifikasi, validasi, dan pemantauan berkala terkait ketercapaian setiap indikator kinerja, serta melakukan koordinasi yang intensif dengan bagian terkait pada tingkat sekretariat BPPSDM dalam penyelesaian permasalahan.



LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Tugas Pengelola Kinerja BRPSDI 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
TELEPON (0264) 750902, POS ELEKTRONIK: brpsdi@kkp.go.id

SURAT TUGAS
B.16/BRPSDI/KP.440/I/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

DIPERINTAHKAN:

Kepada : NAMA DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

- Untuk :
1. Di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada Tahun Anggaran 2025;
 2. Masa Kerja Tim Pengelolaan Kinerja pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terhitung sejak Surat Tugas ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
 3. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Purwakarta, 7 Januari 2025
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran I

Nomor : B.16/BRPSDI/KP.440/I/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
2.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum
3.	Anggota	Riswanto, S.Kel., M.Si Indriatmoko, S.Kel., M.Si Dimas Angga Hediarto, S.Pi., M.Si Rakhmat Sarbini
4.	Kontributor	Tatok Priswanto, S.E Dyah Ika Kusumaningtyas, S.Si Ahmad Fahrudin, S.A.N

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran II

Nomor : B.16/BRPSDI/KP.440/II/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

URAIAN TUGAS
SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN TAHUN 2025

1. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2025
 - b. Ketua
Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) Tahun 2025 sesuai dengan arahan dan kebijakan penanggung jawab Tim Penyusunan laporan kinerja (LKj)
 - c. Anggota
 - 1) Menyiapkan bahan dan informasi serta bukti capaian kinerja serta menyusun laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2025
 - 2) Melakukan pemutakhiran data dan informasi serta rekonsiliasi pada system aplikasi pengelolaan kinerja
 - d. Kontributor
Membantu pengumpulan bahan, menyiapkan dan menyampaikan data informasi serta bukti capaian kinerja dalam penyusunan laporan kinerja (LKj) BRPSDI Tahun 2025
2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025 mengikuti jadwal dan arahan dari Sekretariat BPPSDM KP sebagai intansi Pembina dalam penyusunan Laporan Kinerja

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran II. Dokumen PK BRPSDI Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppsdrm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Iswari Ratna Astuti**

Jabatan : Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Iswari Ratna Astuti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPSDI (%)	85
	2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	92
	3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPSDI (Nilai)	80
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPSDI (Nilai)	71,5
	5. Indeks Profesionalitas ASN BRPSDI (Indeks)	82,5
	6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)	80
	7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPSDI (%)	80
	8. Nilai PNBPN Satker BRPSDI (Rupiah)	2.200.000
	9. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPSDI (Kemitraan)	1
	10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)	100
	11. Keterbukaan Informasi Publik BRPSDI (Nilai)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.361.977.000
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2025		6.361.977.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Iswari Ratna Astuti

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6.624.877.000
Total Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2024		6.624.877.000

Jakarta, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris BPPSDM



Rudi Alek Wahyudin

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan



Iswari Ratna Astuti

Lampiran III. Dokumen capaian realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPSDI (%)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

Nomor : B. 3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 14 April 2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP"

Yth. (daftar nama terlampir)

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2025 (Triwulan I Tahun 2025);
2. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2025 lingkup BPPSDM KP sebesar 90,64% (tuntas 155 dari 171 rekomendasi);
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen disampaikan pada lampiran;
4. UPT yang tidak terdapat pada lampiran, merupakan UPT yang tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas sebelum pengukuran triwulan I, sehingga capaian IKU-nya 100%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat menyampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Satker Saudara atas capaian terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala BPPSDM
Sekretaris BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin

Tembusan :
1. Kepala Badan
2. Inspektur Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat
Nomor : B.3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025
Tanggal : 14 April 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDM
Triwulan I Tahun 2025

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BPPSDM KP	32	31	96,88
2	Pusdik KP	0	0	0
3	PuslatKP	0	0	0
4	Pusluh KP	4	4	100
6	BBRP2BKP	0	0	0
7	BBRSEKP	0	0	0

No	Satker	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	BPPP Tegal	8	8	100
2	SUPM Tegal	46	37	80,43
3	POLTEK AUP Jakarta	30	26	86,67
4	POLTEK Bone	22	21	95,45
5	POLTEK Karawang	3	3	100
6	POLTEK Pangandaran	12	11	91,67
7	BRPPUPP Palembang	11	11	100
8	BRPBATP Bogor	3	3	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran IV. Dokumen capaian realisasi Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPSDI (%)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
10. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
11. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 14 April 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja

pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

No.	Nama Unit Eselon 1	Persentase RUP Terumumkan			% Capaian IKU TW 1
		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	
1	Inspektorat Jenderal	3,074,204,000.00	3,074,204,000.00	-	100.00%
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	232,904,737,000.00	232,904,737,000.00	-	100.00%
3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	30,061,146,000.00	30,061,146,000.00	-	100.00%
4	Sekretariat Jenderal	141,198,357,000.00	141,198,357,000.00	-	100.00%
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	474,070,870,541.00	474,070,870,541.00	-	100.00%
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	154,301,450,168.00	154,301,450,168.00	-	100.00%
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *	161,663,139,000.00	161,780,884,000.00	(117,745,000.00)	100.07%
8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **	688,474,617,688.00	688,285,621,000.00	188,996,688.00	99.97%
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ***	42,318,573,722.00	42,715,615,722.00	(397,042,000.00)	100.94%

Sebagai informasi, terdapat 6 (lima) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH / KURANG TERUMUMKAN di dalam SIRUP, antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung persentase 101,52%;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga persentase 139,11%;
2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon persentase 94,75%;
3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman persentase 79,56%;

❖ **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

- 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan persentase 105,75%.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Badan Penyeluluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,852,355.000	3,602,011.000	3,250,344.000	0	3,250,344.000	100.00%
2	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,734,269.000	766,079.000	968,190.000	0	968,190.000	100.00%
3	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,380,044.000	510,142.000	869,902.000	0	869,902.000	100.00%
4	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,713,372.000	945,404.000	1,767,968.000	0	1,767,968.000	100.00%
5	BALAI RISET PERIKANAN IKAN	3,193,890.000	2,077,925.000	3,117,963.000	0	3,117,963.000	100.00%
6	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,884,926.000	2,455,714.000	4,429,212.000	0	4,429,212.000	100.00%
7	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	5,027,470.000	2,990,213.000	2,037,257.000	0	2,037,257.000	100.00%
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	3,699,357.000	1,360,567.000	2,338,790.000	0	2,338,790.000	100.00%
9	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	8,172,722.000	2,874,033.000	5,298,689.000	0	5,298,689.000	100.00%
10	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	12,977,451.000	7,284,745.000	5,692,706.000	0	5,692,706.000	100.00%
11	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	3,090,000.000	1,666,257.000	1,423,743.000	0	1,423,743.000	100.00%
12	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,871,421.000	3,366,137.000	2,505,284.000	0	2,505,284.000	100.00%
13	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	10,351,733.000	8,974,145.000	1,377,588.000	0	1,377,588.000	100.00%
14	Pusat Penyeluluh Kelautan dan Perikanan	15,645,586.000	7,968,044.000	7,677,542.000	0	7,677,542.000	100.00%
15	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	5,353,114.000	3,899,339.000	1,453,775.000	0	1,453,775.000	100.00%
16	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	12,180,958.000	10,520,456.000	1,660,502.000	0	1,660,502.000	100.00%
17	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	11,198,948.000	9,407,506.000	1,791,442.000	0	1,791,442.000	100.00%
18	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	4,894,433.000	3,558,327.000	1,336,106.000	0	1,336,106.000	100.00%
19	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	6,430,703.000	5,176,541.000	1,254,162.000	0	1,254,162.000	100.00%
20	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	27,934,979.000	13,535,768.000	14,399,211.000	0	14,399,211.000	100.00%
21	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	17,719,192.000	8,500,585.000	9,218,607.000	0	9,218,607.000	100.00%
22	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	6,417,426.000	5,522,634.000	894,792.000	0	894,792.000	100.00%
23	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,483,764.000	3,178,854.000	2,304,910.000	0	2,304,910.000	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	31,989,836.000	3,614,574,356	28,375,261,644	0	28,375,261,644	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	6,882,838.000	4,489,408,476	2,193,429,524	0	2,193,429,524	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	9,773,786.000	6,837,572.000	2,936,214.000	0	2,936,214.000	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	1,706,542.000	546,606.000	1,159,936.000	0	1,159,936.000	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,581,387.000	567,902.000	1,013,485.000	0	1,013,485.000	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	4,037,436.000	2,328,361.000	1,669,070.000	0	1,669,070.000	100.00%
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	4,422,804.000	3,318,442.000	1,104,362.000	0	1,104,362.000	100.00%

Lampiran V. Dokumen capaian realisasi Nilai PNBP Satker BRPSDI (Rupiah)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

Nomor : B.3216/BPPSDM.1/KU.340/IV/2025 14 April 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Kinerja PNBP Triwulan I Tahun 2025

Yth.

Kepala Satuan Kerja lingkup BPPSDM

Bersama ini terlampir kami sampaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja lingkup BPPSDM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Data capaian sebagaimana dimaksud berdasarkan data pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dan kiranya dapat dipergunakan sebagai bukti capaian kinerja PNBP Satuan Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala BPPSDM
Sekretaris BPPSDM,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Alek Wahyudin

Tembusan:

1. Kepala BPPSDM;
2. Pejabat Eselon II BPPSDM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I Surat Dinas
 Nomor : B.3216/BPPSDM.1/KU.340/IV/2025
 Tanggal : 14 April 2025

CAPAIAN KINERJA PNBP SATKER BPPSDM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN PNBP (RP)		
		PAGU	REALISASI	Persentase
	BPPSDM	32.403.240.000	12.923.578.551	39.88%
	SATUAN KERJA PNBP	14.250.179.000	4.339.682.688	30.45%
1	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	284.242.000	696.206.995	244.93%
2	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	474.390.000	109.331.532	23.05%
3	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	450.001.000	27.136.324	6.03%
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	818.828.000	429.694.495	52.48%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	783.175.000	111.975.715	14.30%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	188.600.000	65.107.333	34.52%
7	AK KP WAKATOBI	17.177.000	-	0.00%
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	49.426.000	257.532	0.52%
9	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	-	4.550.212	0.00%
10	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.025.000	52.894.242	96.13%
11	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	-	32.060.562	0.00%
12	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	41.274.000	26.807.569	64.95%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2.200.000	22.182.249	1008.28%
14	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	-	1.523.039	0.00%
15	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	552.000.000	45.098.051	8.17%
16	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	1.623.862.000	203.894.218	12.56%
17	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	92.800.000	17.920.456	19.31%
18	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	210.000.000	28.931.600	13.78%
19	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	408.640.000	131.822.730	32.26%
20	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	26.500.000	1.327.244	5.01%
21	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	-	2.726.045	0.00%
22	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	-	2.155.224	0.00%
23	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	543.951	0.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	239.929.000	44.966.210	18.74%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	165.334.000	4.880.605	2.95%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	385.000.000	371.159.236	96.40%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	104.000.000	44.519.450	42.81%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	366.025.000	10.276.957	2.81%
29	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	2.741.692.000	561.797.997	20.49%
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	105.464.000	6.564.858	6.22%
31	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	1.315.229.000	471.918.366	35.88%
32	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	-	4.524.588	0.00%
33	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	475.000.000	57.952.626	12.20%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	-	69.413.035	0.00%
35	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	454.385.000	442.879.814	97.47%
36	SEKRETARIAT BPPSDM	-	157.437.452	0.00%
37	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	255.074.000	43.914.630	17.22%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	700.907.000	13.082.439	1.87%
39	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	864.000.000	20.247.107	2.34%
	SATUAN KERJA BLU	18.153.061.000	8.583.895.863	47.29%
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	7.812.371.000	6.770.691.019	86.67%
41	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	10.340.690.000	1.813.204.844	17.53%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran VI. Dokumen capaian Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI (%)

Hasil Perhitungan Pemenuhan Dokumen IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPSDI TW I Tahun 2025

NO	LAPORAN	B01		B02		B03		S.D TW I		PERSENTASE	DATA DUKUNG
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	Laporan Mingguan	4	4	4	4	4	4	12	12	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1F5Z2ZBdJCwUKufmWkIBcQ_qPzssJL6?usp=sharing
2	Laporan Bulanan	2	2	2	2	2	2	6	6	100%	https://drive.google.com/drive/folders/18yVh4k2KIQb-H26N74JyV-0003g?usp=sharing
a	Laporan Bulanan (Manajerial)	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1wJA0A8jKDWmcJB0miUOUz96gpnZ2B7F7?usp=sharing
b	Laporan Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1achGaEqYdXnpCCouL1CRJHGV8JwBSYI2?usp=sharing
3	Laporan Triwulanan	0	0	0	0	2	2	2	2	100%	https://drive.google.com/drive/folders/15QRX2pUgR6xS-W0t9nH-HoaSql_dq3pV_OhU?usp=sharing
a	Laporan Kinerja Triwulan	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/10uG109F_nC7IFz8ut-Ub3Nf6ms6_h2If?usp=sharing
b	Laporan SPIP Triwulan	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1achGaEqYdXnpCCouL1CRJHGV8JwBSYI2?usp=sharing
c	Laporan Kegiatan JF	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	https://drive.google.com/drive/folders/10Cgjh1YhFuHoc61PLTWm9krlQl9G8-?usp=sharing
TOTAL LAPORAN LAYANAN DUKMAN										100%	

Jatiluhur, 1 April 2025



Ratna Astuti
 NIP. 19691124 199503 2 001